

IMPLEMENTATION OF THE STUNTING REDUCTION POLICY IN THE BUKIT SURUNGAN DISTRICT OF PADANG PANJANG CITY

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN BUKIT SURUNGAN KOTA PADANG PANJANG

Branda Deriantama Mandaila Putra ^{1a(*)}Rahmadani Yusran ^{2b}

¹² Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^aBrandadmp@gmail.com

^byusranrdy@fis.unp.ac.id

(*) Corresponding Author
 Brandadmp@gmail.com

How to Cite: Branda Deriantama Mandaila Putra. (2024). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kelurahan Bukit Surungan Kota Padang Panjang doi: 10.36526/js.v3i2.4186

Received: 18-06-2024
 Revised : 16-07-2024
 Accepted: 24-08-2024

Keywords:
*Policy Implementation,
 Stunting,
 Bukit Surungan*

Abstract :

The Padang Panjang city government is trying to reduce the stunting rate to 16% in 2023 and 14% in 2024, by strengthening data and determining the focus on reducing stunting rates. This reduction is in support of the National Action Plan for the Acceleration of Reducing Indonesia's Stunting Rate (RAN PASTI) which is planned by the government through the BKKBN. This research uses descriptive qualitative methods to describe in detail the local government's strategy in handling stunting cases in Padang Panjang City. Data was obtained from interviews with informants regarding strategies, influencing factors, and ways to overcome obstacles in reducing stunting rates in Surungan Hill, as well as observations of children affected by stunting and their parents. Observations were carried out on February 28 and March 1 2023. Apart from interviews and observations, the research also used documentation studies of regulations, media information and other relevant secondary data sources. This research aims to analyze the implementation of Padang Panjang city government policies in Bukit Surungan Subdistrict in reducing stunting. The research results show that the implementation of the stunting reduction policy in Bukit Surungan Village by the Padang Panjang City Government shows serious efforts to achieve the standards and targets that have been set. The main challenges include low community participation, limited health workforce, unequal distribution of resources, and lack of coordination between organizations. Efforts to increase the number and capacity of health cadres, improve distribution systems, and better communication and coordination are very necessary. The dedication of implementing agents greatly supports the success of the program, however additional training and incentives are needed to maintain motivation and work effectiveness. External factors such as social, political and economic conditions also influence policy implementation, with city government support and social assistance programs being very important to overcome family economic limitations. Education and counseling involving various parties is needed to increase public awareness and knowledge about the importance of nutrition.

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang sering terjadi pada anak akibat kekurangan gizi atau pola makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi (MCA, 2014). Stunting merupakan konsekuensi jangka panjang dari kekurangan gizi ketika tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi (SD) (WHO, 2010). Prevalensi balita stunting di Sumatera Barat tahun 2016 sebesar 25,6% (Kemenkes, 2017). Menurut Pemantauan Status Gizi (PSG) balita, kejadian inimengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 30,6%, yang dikategorikan pendek 21,3% dan sangat pendek

9,3% (Kemenkes, 2018). Prevalensi balita stunting di kota Padang tahun 2018 sebesar 22,6% (Kemenkes, 2018). Kejadian ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 14,9%. (DKK, 2014).

Rendahnya asupan gizi merupakan penyebab langsung dari masalah kesehatan gizi pada anak stunting (Gibney, M., 2015). Penurunan kasus stunting ini menitikberatkan pada penatalaksanaan penyebab masalah gizi, yang berkaitan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap makanan bergizi, lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan anak dan bayi, akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pengobatan dan pencegahan, serta kesehatan lingkungan yang terdiri dari tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan).

Namun demikian, kebijakan stunting di Sumatera Barat masih belum terlaksana dengan baik, misalnya di Kabupaten Pasaman masih belum berhasil menjalankan kebijakan penurunan stunting karena belum adanya dana khusus untuk intervensi gizi spesifik (Muthia & dkk, 2019). Selain itu kegiatan penyuluhan di Kabupaten Solok dari pemerintah tingkat kecamatan di Labuah Panjang dalam memberantas stunting tidak berjalan, karena penyuluhan yang di berikan tidak fokus pada stunting (Kabullah, 2021). Selain itu di Kabupaten Pesisir Selatan kegiatan posyandu berupa penimbangan dan pengukuran pemeriksaan ibu hamil serta melakukan pemberian tablet tambah darah (TTD) tidak rutin dilaksanakan (Indah & Yusran, 2022). Melihat tingginya angka kejadian Stunting di Sumatera Barat, maka perlu kiranya ada serangkaian kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan-kebijakan itu di rangkai dalam bentuk strategi Nawami (2012:147) menjelaskan dari sudut etimologis penggunaan kata "strategi" dalam manajemen sebuah organisasi, dapat di artikan sebagaikiat, cara dan taktik utama yang di rancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategi organisasi.

Pencegahan stunting dilakukan melalui strategi nasional salah satu sasaran prioritas ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga 1000 HPK dengan intervensi prioritas yaitu intervensi gizi spesifik dan sensitive. Permasalahan saat ini yaitu rendahnya akses informasi yang diperoleh ibu hamil dalam mengawal 1000 HPK menjadi salah satu faktor pencetus tingginya kejadian stunting di Indonesia (Kemenkes RI 2016). Proses sosialisasi dan edukasi program 1000 HPK dan stunting sudah dilakukan, namun terkendala dengan berbagai hal salah satunya pengetahuan dan pendidikan sasaran rendah sehingga minimnya untuk menyerap informasi yang diberikan, waktu kontak dengan sasaran yang terbatas untuk mengawal 1000 HPK. Pemerintah kota Padang Panjang berupaya untuk menurunkan angka stunting menjadi 16% pada tahun 2023 dan 14% pada tahun 2024, dengan memperkuat data serta penentuan fokus penurunan angka stunting. Penurunan tersebut sebagai bentuk dukungan atas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang direncanakan pemerintah melalui BKKBN.

Di Kota Padang Panjang kelurahan Bukit Surungan terdapat 51 anak yang menderita Stunting/Gizi buruk dan Dana yang di berikan oleh bapak asuh Stunting sebesar Rp 350.000 per bulan selama 6 bulan untuk masing- masing anak yang berupa makanan olahan yang di berikan kepada anak setiap hari, makanan olahan tersebut nasi lengkap dengan protein tambahan berupa susu dan buah, dalam jangka waktu 6 bulan ujar Buk Yus selaku ketua puskesmas Bukit Surungan Kota Padang Panjang Barat, sosialisasi yang di berikan untuk pencegahan Stunting berupa penyebab dan penanganannya agar kasus Stunting di Kelurahan Bukit Surungan Kota Padang Panjang Barat bisa teratasi. Kota Padang Panjang memiliki 2 kecamatan dan 16 kelurahan. luas wilayahnya mencapai 23,00 km dan penduduk 53.094 jiwa (2017) dengan sebaran 2.308 jiwa/km.

Pemberian anggaran oleh (basunting) bapak ibu asuh anak stunting jugamasih belum terpenuhi karena pemberian dana sebesar Rp.350.000 per bulan selama 6 bulan untuk di bagikan kepada seluruh anak yang mengalami gizi buruk yang berjumlah 51 orang, dari pemberian dana tersebut, kebutuhan untuk anak yang mengalami gizi buruk masih belum terpenuhi karena masih kurangnya anggaran dana. Ada beberapa peraturan walikota yang tidak di laksanakan salah satunya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi Angka stunting pada tahun 2022 berdasarkan data e- PPGBM di kota Padang Panjang

sebesar 14, 74% atau 491 orang dari 3.333, Ujar Walikota Padang Panjang Drs. Asrul dikutip dari berita sumbar.antarnews.com

Namun dalam kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang Penurunan prevalensi stunting di Kota Padang Panjang masih terdapat masalah, hal ini di sebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

Pertama, kurangnya anggaran dana yang dikeluarkan oleh bapak asuh stunting sehingga tidak mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan akibatnya kebijakan pemerintahan Kota Padang Panjang dalam menurunkan prevalensi stunting belum berhasil di laksanakan. **Kedua**, kader yang memberikan pembinaan dalam meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga yang kurang meningkatkan kualitas dan mutu dalam meningkatkan kuantitas penyiapan kehidupan berkeluarga. **Ketiga**, dalam penurunan Stunting dalam menjamin pemenuhan asupan gizi kota padang panjang di kelurahan koto panjang dan bukit surungan yang menjadi kendala pada pemenuhan asupan gizi yaitu dana yang di berikan oleh bapak asuh stunting kurang yang dimana dana didapatkan sebesar Rp 350,000. **Keempat**, pelayanan kesehatan belum berhasil di laksanakan sebagaimana mestinya hal ini di sebabkan oleh fasilitas yang kurang memadai, kurangnya peningkatan sarana prasarana, kurangnya pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat, dalam permasalahan ini di kota padang panjang khususnya kelurahan bukit surungan jarang melakukan bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan bagi kader atau petugas posyandu.

METODE

Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan secara mendetail dari data fakta dan realita lapangan yang di dapatkan terkait Strategi pemerintah daerah dalam menangani kasus Stunting di Kota Padang Panjang.

Dalam hal ini data di peroleh langsung dari hasil wawancara dengan informan tentang: Pertama Bagaimana strategi Pemerintah Bukit Surungan dalam menekan angka kasus Stunting di Bukit Surungan. Kedua Faktor yang mempengaruhi Pemerintah Bukit Surungan dalam menekan angka kasus Stunting di Bukit Surungan. Ketiga Bagaimana Pemerintah Bukit Surungan mengatasi kendala dalam menekan angka kasus Stunting di Bukit Surungan. Selain itu, data tentang gambaran umum lokasi penelitian. Peraturan dan per undang-undangan, informasi media dan sumber data sekunder lain yang di peroleh melalui studi dokumentasi terhadap literatur yang dapat menunjang penelitian.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang terlibat dalam kebijakan dalam strategi penurunan stunting di kota padang panjang. Wawancara berkaitan dengan bagaimana strategi kebijakan pemerintah kota padang panjang di kelurahan bukit surungan dalam penurunan stunting. Adapun wawancara dilakukan tentang: Pertama Bagaimana strategi Pemerintah Bukit Surungan dalam menekan angka kasus Stunting di Bukit Surungan. Kedua Faktor yang mempengaruhi Pemerintah Bukit Surungan dalam menekan angka kasus Stunting di Bukit Surungan. Ketiga Bagaimana Pemerintah Bukit Surungan mengatasi kendala dalam menekan angka kasus Stunting di Bukit Surungan. Selain itu, penelitian ini juga dilakkan dengan observasi. Yang akan digunakan ketika melakukan observasi yaitu mendata anak yang terkena stunting dan melakukan observasi kepada orang tua yang anaknya terkena stunting tersebut. observasi dilakukan pada tanggal 28 february dan 1 maret 2023 dan lama melakukan observasi kepada anak yang terkena stunting selama dua hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Di Kelurahan Bukit Surungan terdapat angka stunting dari bulan April s/d Juni Tahun 2024 sebanyak 149 orang berdasarkan Laporan dari Bidan Kelurahan. Untuk itu 3 unsur yang bekerjasama dalam pendampingan untuk pencegahan stunting yaitu :

1. Bidan Kelurahan
2. Penyulu KB dan Kader KB
3. PKK Kelurahan

Peranan ke 3 unsur ini sangat penting untuk mempercepat atau me Nol kan angka stunting yang ada di Kelurahan Bukit Surungan dan juga melibatkan lembaga yang ada di Kelurahan seperti LPM, RT, Karang Taruna, Babin, Babinsa, Pengusaha, Tokoh Masyarakat serta Ninik Mamak dan Bundo Kandang. Kelurahan Bukit Surungan adalah salah satu dari delapan kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dengan luas lebih kurang 121 hektar yang terdiri dari 9 RT. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 2.628 jiwa yang terdiri dari 728 kepala keluarga, laki-laki 1.199 jiwa dan 1.329 jiwa perempuan. Kelurahan Bukit Surungan mempunyai 5 Posyandu yaitu :

Tabel 1. Posyandu di Kelurahan Bukit Surungan

No	Nama	Alamat	Sasaran		
			April	Mei	Juni
1.	Posyandu Seruni	RT 1 dan RT 9	28	30	32
2.	Posyandu Melati	RT 4 dan RT 5	21	21	20
3.	Posyandu Anyelir	RT 6 dan RT 7	22	22	22
4.	Posyandu Akasia	RT 8	41	42	42
5.	Posyandu Kamboja	RT 2 dan RT 3	34	33	33

Pemetaan kasus stunting di Kelurahan Bukit Surungan terhadap 5 posyandu sasaran yang yang teridentifikasi stunting. Bulan April 2024 :

Tabel 2. Pemetaan Kasus Stunting di Kelurahan Bukit Surungan

1.	<i>Posyandu Seruni pada Bulan April sasaran yang kena stunting</i>	5
2.	Posyandu Melati pada Bulan April sasaran yang kena stunting	2
3.	Posyandu Anyelir pada Bulan April sasaran yang kena stunting	7
4.	Posyandu Akasia pada Bulan April sasaran yang kena stunting	8
5.	Posyandu kamboja pada Bulan April sasaran yang kena stunting	9
	JUMLAH	28

Program TPPS dalam pengentasan stunting di Kelurahan Bukit Surungan yaitu :

1. Posyandu kepada balita dan ibu hamil
 Yang dilaksanakan 1 x 1 bulan, Yaitu :
 - a. Pelayanan kepada ibu hamil
 Pemeriksaan kehamilan dan pemantauan gizi, Konsultasi terkait persiapan persalinan dan pemberian ASI. Setelah melahirkan : Ibu mendapatkan suplemen vitamin A, Vitamin B dan Zat Besi yang baik dikonsumsi selama menyusui, Konseling untuk ibu menyusui agar proses pemberian ASI Eksklusif untuk anak terpenuhi
 - b. Pelayanan Balita
 - 1) Penimbangan berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan dan lingkaran kepala kepada

- nak setiap bulan.
- 2) Evaluasi tumbuh kembang, penyuluhan dan konseling tumbuh kembang.
 - 3) Deteksi dini gangguan pertumbuhan
 - 4) Penyuluhan gizi dan pemberian suplemen Vitamin A
 - 5) Hasil pemeriksaan tersebut dicatat di dalam buku KIA dan KMS.
 - 6) Untuk memantau tumbuh kembang anak
 - 7) Mendeteksi dini bila ditemukan ibu hamil dengan kondisi kurang Energi Kronis (KEK) sehingga langkah berikutnya dapat segera diambil ketika ditemukan permasalahan.
 - 8) Pemberian PMT pencegahan stunting untuk Balita dan Ibu Hamil
2. Kunjungan TPPS (Bidan, TPK, PKK)
- Kunjungan dilakukan oleh kader pendamping keluarga bersama dengan Bidan dilakukan 1x 1 bulan sebelum kunjungan keposyandu dan kunjungan rumah untuk survey tempat tinggal dari anak teridentifikasi stunting, memberikan pembinaan dan konseling secara terarah tentang keluarga dan anak tersebut dan pemeriksaan lingkungan rumah, jamban, dan air bersih.
3. Membudidayakan jamur
- Mengajak ibu – ibu yang mempunyai balita terutama teridentifikasi stunting untuk budidaya jamur yaitu jamur tiram manfaatnya banyak terutama :
- a. Meningkatkan kesehatan jantung
 - b. Kaya anti oksidan
 - c. Memperkuat system imun tubuh
 - d. Menurunkan resiko kanker
 - e. Dapat mengontrol kadar gula darah
 - f. Sumber vitamin B3 (Niasin)
- Dalam 100 gram jamur tiram memiliki kandungan niasin sebanyak 1 mg, niasin memegang peranan penting dalam untuk membantu proses pertumbuhan, perkembangan serta organ –organ dalam tubuh.
4. Menggalakan untuk menabung dicelengan sedekan Pagi disetiap RT, seandainya ada teridentifikasi balita stunting maka cepat teratasi dengan memberikan bantuan kepada balita stunting berupa barang atau uang yang diperlukan dalam penanganan stunting (terutama penambahan gizi anak).
 5. Menggerakkan bantuan moril maupun material dari berbagai elemen di Kelurahan Bukit Surungan dalam penanganan stunting.
 6. Pemberian pupuk secara gratis kepada ibu –ibu yang mempunyai balita stunting untuk dapat memanfaatkan pekarangan dengan memberikan pupuk secara gratis sehingga tumbuh subur jadi ketahanan pangan keluarga teratasi.
 7. Sosialisasi Agama kepada Ibu Balita. Sosialisasi ini bertujuan menambah ilmu agama dan kedekatan kita kepada Allah sehingga jiwaibu yang menyusui, hamil dan mengasuh anak tenang dan si Ibu tidak depresi.
 8. Pengusaha peduli akan balita stunting, Memberikan bantuan berupa bantuan tambahan PMT
 9. Memberikan penyuluhan untuk menanam pegagan yang tumbuh liar dan subur dipekarangan untuk dijadikan makanan pelancar ASI bagi Ibu Menyusui.
 10. Menggerakkan literasi yaitu membaca bagi ibu –ibu dalam mengasuh anak supaya tumbuh kembang



Gambar 1.

Penyerahan Bantuan BASUNTIANG dari Dinas PUPR bersama ketua TPPS Dalam hal pengentasan stunting TPPS Kelurahan Bukit Surungan bekerjasama dengan :

1. Pengusaha – Pengusaha Jamur
2. Perangkat – Perangkat RT, Dasawisma, Karang Taruna, LPM
3. Dokter – Dokter yang ada di Kelurahan
4. Pengusaha Besar maupun kecil
5. Keterlibatan Perangkat Daerah

Keterlibatan mereka ada yang berupa moril maupun materil sehingga stunting di Kelurahan Bukit Surungan cepat teratasi dengan adanya penurunan stunting

$\text{Jumlah Stunting} / \text{Jumlah Sasaran Seluruh Posyandu} \times 100\% = \% \text{ Stunting}$

- April = $28/146 \times 100\% = 19,17\%$
- Mei = $23/145 \times 100\% = 15.86\%$
- Juni = $20 / 149 \times 100\% = 13.42\%$

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kelurahan Bukit Surungan Kota Padang Panjang

a. Peningkatan Akses Gizi bagi anak-anak

Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan menunjukkan upaya yang serius dari pemerintah setempat untuk memenuhi standar dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pemantauan gizi rutin, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan kesehatan untuk orang tua. Konsep standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur ini penting untuk memastikan bahwa program penurunan stunting dapat direalisasikan secara efektif, seperti yang ditekankan dalam konsep sebelumnya. Namun, meskipun standar kebijakan telah ditetapkan dengan baik, realisasi di lapangan menghadapi beberapa tantangan. Salah satu alasan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program yang diselenggarakan. Menurut konsep standar dan sasaran kebijakan, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat menghambat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan realisasi di lapangan. Kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya partisipasi dalam program posyandu menjadi hambatan utama. Konsep standar dan sasaran kebijakan menekankan pentingnya keterukuran dan kejelasan dalam sasaran, serta perlunya penyesuaian strategi untuk mengatasi hambatan yang ada. Secara keseluruhan, meskipun standar dan sasaran kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan sudah ditetapkan dengan baik, implementasinya menghadapi beberapa kendala. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan sistem distribusi, dan intensifikasi upaya sosialisasi.

b. Sumber daya kader dalam penunjang kebijakan penurunan stunting

Dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan, berbagai sumber daya menjadi elemen kunci yang mempengaruhi efektivitas program. Pemerintah kota menyediakan dukungan materi berupa anggaran untuk pembelian makanan tambahan, alat kesehatan, dan biaya pelatihan kader kesehatan. Puskesmas setempat juga berperan penting dengan menyediakan tenaga medis dan fasilitas pemeriksaan rutin. Meskipun demikian, kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor penentu utama keberhasilan kebijakan ini. Kader kesehatan yang terlatih terlibat langsung dalam pemantauan perkembangan anak dan edukasi orang tua, namun jumlah kader yang terbatas menjadi kendala signifikan.

Keterbatasan dalam distribusi sumber daya materi juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Meski anggaran untuk makanan tambahan dan alat kesehatan telah tersedia, distribusi yang tidak merata sering menjadi masalah. Tantangan lainnya termasuk keterbatasan anggaran dan jumlah tenaga kesehatan yang tidak memadai. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan peningkatan jumlah dan kapasitas kader kesehatan serta perbaikan dalam sistem distribusi sumber daya. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan dari semua jenis sumber daya, dan mengoptimalkan sumber daya tersebut merupakan kunci untuk mencapai sasaran kebijakan dan memastikan keberhasilan program secara menyeluruh.

c. Kolaborasi antar lembaga masyarakat

Dalam upaya menurunkan angka stunting di Kelurahan Bukit Surungan, kolaborasi antar lembaga masyarakat memainkan peran penting. Koordinasi antara pemerintah kelurahan dengan puskesmas, Dinas Kesehatan, dan lembaga non-pemerintah seperti posyandu menunjukkan adanya kerjasama yang baik dalam menyediakan fasilitas medis, edukasi kesehatan, dan pemeriksaan rutin. Namun, tantangan sinkronisasi jadwal dan kegiatan antara berbagai organisasi masih menjadi hambatan, mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan lebih baik.

Kolaborasi dengan posyandu, sekolah, dan kelompok masyarakat memperkuat upaya edukasi mengenai gizi dan kesehatan, meskipun tantangan dalam menyelaraskan program antar organisasi masih ada. Pemerintah Kelurahan Bukit Surungan juga melibatkan kelompok PKK dan karang taruna dalam kegiatan edukatif dan preventif, tetapi kendala koordinasi waktu dan sumber daya menyoroti pentingnya hubungan antar organisasi. Untuk mengatasi masalah komunikasi yang sering muncul, penggunaan media sosial dan grup WhatsApp bisa menjadi langkah penting untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Dengan demikian, upaya signifikan dalam membangun hubungan antar organisasi harus terus ditingkatkan untuk mencapai efektivitas program penurunan stunting secara optimal.

d. Karakteristik Kader Pendamping Stunting

Pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan sangat dipengaruhi oleh karakteristik para pelaksana program. Kader posyandu dan tenaga medis menunjukkan dedikasi tinggi yang didukung oleh latar belakang pendidikan dan pelatihan memadai. Mereka aktif berpartisipasi dalam program ini dengan semangat dan kepedulian yang tinggi, mendukung pencapaian target program. Namun, ada beberapa area yang memerlukan perbaikan, terutama dalam keterampilan komunikasi dan penyuluhan kepada masyarakat, yang penting untuk meningkatkan efektivitas edukasi mengenai gizi dan kesehatan anak.

Meskipun dedikasi para pelaksana sudah baik, tantangan dalam keterampilan komunikasi dan pengelolaan data administrasi masih perlu diatasi. Beberapa pelaksana merasa kurang percaya diri dalam memberikan edukasi, dan kemampuan dalam mengelola data serta administrasi perlu ditingkatkan. Rencana pelatihan tambahan dan bimbingan sedang dipersiapkan untuk meningkatkan keterampilan ini, sehingga pelaporan dan evaluasi program dapat dilakukan dengan lebih efektif. Komitmen kuat dari agen pelaksana terlihat dari inisiatif

mereka, seperti penyuluhan tambahan di luar jam kerja. Peningkatan keterampilan, motivasi, dan koordinasi, serta penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan data dan administrasi, menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program penurunan stunting.

e. Pemberian Makanan Sehat Tambahan kepada masyarakat yang memiliki balita

Dalam upaya menurunkan angka stunting di Kelurahan Bukit Surungan dan Koto Panjang, pemerintah kelurahan mengimplementasikan program pemberian bantuan makanan bergizi. Program ini melibatkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk kader posyandu dan relawan setempat. Pendistribusian bantuan dilakukan dengan mendata keluarga yang memenuhi kriteria seperti status ekonomi dan kondisi kesehatan anak-anak. Jadwal distribusi dan titik-titik pembagian diatur agar mudah dijangkau, dan penerima bantuan diberi informasi tambahan mengenai pentingnya asupan gizi seimbang. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh kader posyandu dan relawan melalui kunjungan rumah untuk memastikan bantuan makanan bergizi benar-benar dikonsumsi, serta memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya gizi dan cara penyajian makanan higienis. Survei kepuasan penerima bantuan juga dilakukan untuk mendapatkan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki program.

Kader posyandu memainkan peran penting dalam mendukung program ini dengan mendata keluarga yang membutuhkan, mendistribusikan bantuan, dan memberikan edukasi tentang gizi seimbang. Kendala yang dihadapi dalam pendistribusian makanan bergizi termasuk akses transportasi yang sulit dan keterbatasan peralatan. Beberapa keluarga juga kurang paham tentang pentingnya gizi dan enggan menerima bantuan, sehingga kader harus memberikan edukasi ekstra. Tantangan koordinasi dengan dinas kesehatan dan organisasi non-pemerintah juga perlu diatasi untuk memastikan bantuan sesuai dengan kebutuhan penerima. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan komitmen dan kerja keras dari berbagai pihak untuk menurunkan angka stunting, dengan monitoring rutin dan edukasi yang terus-menerus untuk memastikan efektivitasnya. Dukungan dari semua pihak dan koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan program dalam meningkatkan kesehatan anak-anak di wilayah tersebut.

f. Komitmen Pelaksana dalam pelaksanaan program penurunan stunting

Pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan sangat dipengaruhi oleh disposisi dan sikap positif dari para pelaksana program, seperti kader posyandu. Mereka tidak hanya menjalankan tugas saat posyandu, tetapi juga melakukan kunjungan rumah untuk memberikan edukasi dan pemantauan kesehatan secara personal. Sikap proaktif dan kepedulian ini membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan masyarakat, sehingga mempermudah pelaksanaan program. Para pelaksana juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengajak masyarakat untuk mengikuti program posyandu dan memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang. Responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat, mereka menciptakan lingkungan yang mendukung terlaksananya program dengan lebih efektif.

Namun, meskipun para pelaksana menunjukkan dedikasi tinggi, terdapat kekurangan dalam dukungan yang mereka terima, baik dari segi pelatihan tambahan maupun insentif finansial. Beberapa pelaksana merasa bahwa penghargaan yang mereka terima belum sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan frekuensi pelatihan dan memberikan insentif tambahan bagi pelaksana yang berprestasi. Dukungan yang lebih baik dapat memotivasi pelaksana untuk terus memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas mereka. Secara keseluruhan, pelaksana di Kelurahan Bukit Surungan memiliki sikap mendukung kebijakan dengan komitmen tinggi, namun diperlukan dukungan tambahan untuk menjaga motivasi dan efektivitas kerja dalam program penurunan stunting.

g. Kondisi Lingkungan sosial, Politik dan Ekonomi dalam pelaksanaan program stunting

Pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Dari segi sosial, meskipun partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu cukup tinggi, tantangan tetap ada dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai pentingnya gizi. Beberapa keluarga masih belum memahami pola makan yang sehat dan sulit mengubah kebiasaan makan yang kurang memadai. Untuk mengatasi hal ini, diadakan berbagai program penyuluhan dan edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan kader posyandu. Aspek politik juga sangat penting, dengan dukungan dari pemerintah kota Padang Panjang yang menyediakan kebijakan dan anggaran yang memadai. Namun, perubahan kebijakan yang tiba-tiba dan birokrasi yang lambat dapat menghambat pelaksanaan program, sehingga diperlukan komunikasi terus-menerus dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran implementasi.

Kondisi ekonomi juga mempengaruhi pelaksanaan program penurunan stunting. Keterbatasan ekonomi keluarga sering kali menjadi kendala dalam menyediakan makanan bergizi, sehingga program bantuan sosial menjadi sangat penting untuk mendukung keluarga yang membutuhkan. Kerja sama dengan berbagai program bantuan sosial dapat membantu mengatasi masalah ekonomi yang menghambat penyediaan gizi yang adekuat. Tingkat pendidikan dan kesadaran mengenai gizi masih menjadi tantangan signifikan, dengan banyak keluarga yang belum menyadari pentingnya gizi dan kesehatan anak. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya gizi sangat diperlukan. Secara keseluruhan, keberhasilan program penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Upaya untuk mengatasi tantangan sosial, politik, dan ekonomi terus dilakukan dengan tujuan memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesehatan anak di wilayah tersebut.

2. Faktor Pendukung & Penghambat Implementasi Kebijakan kota Padang Panjang di Kelurahan Bukit Surungan dalam Pelaksanaan Penurunan Stunting

a. Faktor Pendukung

1) Komitmen Pemerintah

Komitmen kuat dari pemerintah kota Padang Panjang merupakan faktor utama dalam keberhasilan program penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan. Pemerintah memberikan dukungan signifikan melalui penyediaan anggaran yang cukup untuk berbagai kegiatan kesehatan, seperti pemeriksaan rutin dan penyuluhan gizi, serta penguatan fasilitas kesehatan dengan alat-alat medis yang diperlukan. Selain itu, pelatihan untuk tenaga kesehatan dan kader posyandu juga mendapat perhatian khusus, memastikan layanan kesehatan yang diberikan optimal. Komitmen ini tercermin dalam upaya pemerintah untuk menyediakan dukungan yang menyeluruh, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, yang membantu menekan angka stunting di kelurahan tersebut.

Selain dukungan materi, komitmen pemerintah juga terlihat dari pelaksanaan monitoring rutin dan evaluasi berkala terhadap program penurunan stunting. Pemerintah kota secara aktif memantau dan memberikan arahan serta motivasi kepada pelaksana program di lapangan, yang berdampak positif pada semangat kerja mereka. Evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi pemerintah turut memastikan bahwa setiap kendala di lapangan segera ditangani dengan solusi yang tepat, seperti pemberian bantuan tambahan jika ada kekurangan alat kesehatan. Dengan adanya koordinasi yang efektif dan dukungan yang konsisten dari pemerintah, program penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan, membawa dampak positif bagi kesehatan anak-anak di wilayah tersebut.

2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memainkan peran krusial dalam mendukung keberhasilan program penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan. Dukungan masyarakat terlihat dari kehadiran aktif mereka dalam kegiatan posyandu dan pemantauan kesehatan anak, serta sukarelawan yang menjadi kader posyandu untuk mengidentifikasi dan melaporkan kasus anak-anak yang memerlukan perhatian khusus. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah memungkinkan respon cepat terhadap kebutuhan anak-anak, sehingga program dapat terlaksana dengan lebih efektif. Selain itu, masyarakat juga aktif menyebarkan informasi mengenai pentingnya gizi kepada tetangga dan kerabat, memastikan edukasi kesehatan dan gizi anak tersebar luas.

Antusiasme masyarakat juga tercermin dalam inisiatif gotong royong dan diskusi kelompok untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang gizi, serta kontribusi dalam distribusi makanan tambahan. Partisipasi ini menunjukkan bahwa warga tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai kontributor aktif dalam pelaksanaan program. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat yang tinggi memperkuat efektivitas program dan membantu pemerintah mencapai tujuan penurunan stunting dengan lebih cepat dan tepat. Dengan keterlibatan masyarakat yang terus-menerus, program ini dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan anak-anak di Kelurahan Bukit Surungan.

3) Kerja Sama Antar Lembaga

Keberhasilan program penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan sangat dipengaruhi oleh kerja sama yang solid antara berbagai lembaga. Kolaborasi antara puskesmas, dinas kesehatan, dan Karang Taruna menjadi faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan program ini. Puskesmas menyediakan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, sementara dinas kesehatan menyuplai anggaran dan mengadakan pelatihan untuk kader posyandu. Karang Taruna berperan dalam edukasi masyarakat dan distribusi bantuan makanan tambahan, sehingga semua pihak berkontribusi pada kelancaran dan efektivitas program.

Kolaborasi antar lembaga ini sangat penting untuk memastikan distribusi sumber daya yang efektif dan pelaksanaan program sesuai rencana. Sinergi antara instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta memperkuat pelaksanaan program, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memfasilitasi distribusi bantuan serta edukasi yang dibutuhkan. Meskipun menghadapi tantangan dalam koordinasi dan komunikasi, komitmen bersama dan koordinasi terstruktur menciptakan lingkungan kondusif untuk program ini. Secara keseluruhan, kerja sama antar lembaga di Kelurahan Bukit Surungan memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan penurunan stunting dan memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan anak-anak di kelurahan tersebut.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan. Menurut wawancara, kekurangan dana sering memengaruhi kemampuan untuk menyediakan makanan tambahan bagi anak-anak berisiko stunting dan berdampak pada pembiayaan pelatihan kader posyandu. Dana yang terbatas memaksa pihak berwenang untuk sangat selektif dalam menentukan prioritas kegiatan, sehingga beberapa program penting harus ditunda atau dibatalkan. Masalah ini diperburuk oleh skala prioritas yang harus diutamakan terlebih dahulu, yang mengakibatkan kontinuitas dan efektivitas program menjadi terganggu, terutama dalam pelaksanaan kegiatan posyandu dan penyuluhan gizi.

Upaya mencari dukungan finansial dari pemerintah provinsi dan sektor swasta telah dilakukan, namun hasilnya belum memadai. Akibat keterbatasan dana, beberapa program harus dijalankan dengan sumber daya seadanya, yang berdampak pada efektivitas dan

keberlanjutan program penurunan stunting. Keterbatasan ini menghambat upaya untuk mencapai hasil yang diharapkan, seperti penyediaan makanan tambahan, pelatihan kader posyandu, dan operasional kegiatan penyuluhan gizi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mencari sumber pendanaan tambahan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang ada. Secara keseluruhan, keterbatasan anggaran merupakan hambatan signifikan yang mempengaruhi pelaksanaan program penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan.

2) Pendidikan gizi masyarakat yang rendah

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai gizi anak merupakan faktor penghambat utama dalam menurunkan angka stunting di Kelurahan Bukit Surungan. Banyak orang tua belum sepenuhnya memahami pentingnya gizi seimbang untuk pertumbuhan anak, sehingga bantuan makanan tambahan yang diberikan sering kali tidak diolah menjadi makanan yang bergizi. Kurangnya pengetahuan ini membuat orang tua memberikan makanan yang kurang bergizi, memperburuk kondisi stunting. Tantangan ini diperparah oleh rendahnya kesadaran mengenai kebersihan dan sanitasi, yang penting dalam upaya pencegahan stunting. Penyuluhan gizi sering kali menemui kendala karena banyak orang tua tidak memiliki pengetahuan dasar tentang gizi seimbang.

Kesulitan dalam penyuluhan juga disebabkan oleh kebiasaan dan tradisi lokal yang tidak mendukung pola makan sehat. Kebiasaan makan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip gizi yang baik memperburuk masalah stunting, meskipun upaya edukasi gizi sudah dilakukan. Perubahan perilaku makan dan kebiasaan yang salah masih menjadi tantangan besar. Secara keseluruhan, rendahnya pendidikan gizi di masyarakat menghambat pelaksanaan program penurunan stunting, menyebabkan pemberian makanan yang kurang bergizi dan memperparah kondisi stunting. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang serta kebiasaan makan sehat sangat penting untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam program penurunan stunting.

3) Distribusi Sumber Daya yang tidak merata

Distribusi sumber daya yang tidak merata menjadi penghambat utama dalam upaya penurunan angka stunting di Kelurahan Bukit Surungan. Menurut Ibu Hera, Kasi Pelayanan Sosial, banyak bantuan tidak sampai ke keluarga yang membutuhkan akibat kendala transportasi dan logistik. Selain itu, jumlah bantuan yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk semua keluarga yang memerlukannya. Upaya untuk memperbaiki distribusi dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat masih menghadapi tantangan besar. Wira Jaya Septikha, Lurah Bukit Surungan, juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran dan infrastruktur yang tidak memadai turut mempengaruhi efektivitas distribusi bantuan.

Ketidakterdistribusian ini berdampak langsung pada upaya penurunan stunting karena beberapa anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, memperlambat pencapaian tujuan program dan mengurangi efektivitas bantuan yang diberikan. Oleh karena itu, masalah ini perlu perhatian lebih untuk memastikan bahwa bantuan sampai secara tepat waktu dan merata kepada semua keluarga yang membutuhkan. Solusi yang lebih komprehensif, termasuk perbaikan dalam sistem logistik, peningkatan infrastruktur, dan alokasi anggaran yang lebih memadai, diperlukan. Upaya memperbaiki distribusi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait harus terus dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal dalam penurunan stunting.

PENUTUP

Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Bukit Surungan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan upaya serius dalam mencapai standar dan sasaran yang telah ditetapkan. Tantangan utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan tenaga kesehatan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan kurangnya koordinasi antar organisasi. Upaya peningkatan jumlah dan kapasitas kader kesehatan, perbaikan sistem distribusi, serta komunikasi dan koordinasi yang lebih baik sangat diperlukan. Dedikasi agen pelaksana sangat mendukung keberhasilan program, namun diperlukan pelatihan tambahan dan insentif untuk menjaga motivasi dan efektivitas kerja. Faktor eksternal seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, dengan dukungan pemerintah kota dan program bantuan sosial sangat penting untuk mengatasi keterbatasan ekonomi keluarga. Edukasi dan penyuluhan yang melibatkan berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugra, Y. S., Sumarlan, A., Yusmaniarti, Y., & Khair, U. (2023). Analisis Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan Program Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Maras Nalisis Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Laporan Keuangan Program Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten . *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 4(1), 47–57.
- Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2020). Pelatihan dan penyuluhan pengelolaan alokasi dana desa (ADD). *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3(1), 63–77.
- Laili, U., & Andriani, R. A. D. (2019). Pemberdayaan masyarakat dalam penurunan stunting. . *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 5(1), 8–12.
- Lela, N., Haeruddin, H., & Amelia, A. R. (2023). Hubungan Penggunaan Dana Desa dengan Penurunan Kasus Stunting di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. *Journal of Muslim Community Health*, 4(4), 170–183.
- Nugroho, M. R., Armeidi, E., & Mahyuddin, M. (2023). Analysis of Indonesia's Nutritional Status Survey Results 2021–2022: Trend of Stunting Prevalence Rates in the Provinces of South Sumatera and Bengkulu Towards a National Target of 14% in 2024. *Indonesian Journal of Health Research and Development*, 1(1), 1–7.
- Nurfatihah, N., Anakoda, P., Ramadhan, K., Entoh, C., Sitorus, S. B. M., & Longgupa, L. W. (2021). Perilaku pencegahan stunting pada ibu hamil. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 15(2), 97–104.
- Prihatini, D., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam upaya pencegahan stunting terintegrasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 46–59.
- Safitra, L., Yuliani, F., & Tofandi, A. (2021). Stunting Prevention Program In North Bengkulu Regency. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 10(2), 119–129.
- Yusran, R., & Aprinita, Y. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penurunan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. *JMIAP*, 3(1), 87–97.